

Membangun Industri Peternakan Sapi Potong Rakyat dalam Mendukung Kecukupan Daging Sapi

Rini Widiati

*Fakultas Peternakan, Universitas Gadjah Mada, Jl. Fauna 3, Bulaksumur, Yogyakarta
riniwidiati2014@gmail.com; rini_w@ugm.ac.id*

(Diterima 8 September 2014 – Direvisi 21 November 2014 – Disetujui 5 Desember 2014)

ABSTRAK

Lebih dari 90% pasokan daging sapi lokal berasal dari peternakan rakyat yang kurang efisien, sehingga pertumbuhan produksi daging sapi lokal belum dapat memenuhi permintaan nasional. Harga daging sapi impor lebih rendah dibandingkan daging lokal, sehingga di tingkat peternak terjadi penyesuaian harga yang merugikan. Naskah ini mendeskripsikan gagasan yang dapat memformulasikan strategi alternatif untuk membangun industri peternakan sapi potong rakyat. Strategi yang diperlukan untuk membangun industri peternakan sapi potong rakyat, diantaranya adalah (1) Pengadaan fasilitas pasar peternakan guna memudahkan akses untuk mendapatkan sarana produksi; (2) Ketersediaan teknologi yang dapat diterapkan peternak dan memberikan perbaikan kesejahteraan melalui peningkatan produktivitasnya; (3) Menciptakan pasar produk ternak yang menguntungkan bagi peternak; dan (4) Terbentuknya subsistem lembaga pembiayaan tingkat perdesaan untuk mendanai peningkatan produksi dan produktivitas usaha. Perlu adanya keterkaitan secara bersinergi diantara strategi tersebut disertai dukungan kebijakan pemerintah yang operasional.

Kata kunci: Industri, peternakan sapi potong rakyat, kecukupan daging sapi

ABSTRACT

Developing Beef Cattle Industry at Smallholders to Support Beef Self-Sufficiency

More than 90% of local beef supply derived from smallholder farmers with a relatively slow in growth that could not meet national demand. Price of imported beef was lower than that of the local beef, thus price adjustment in farmers level was not profitable. The purpose of this study is to recommend alternative strategies to develop beef cattle industry under smallholders' farmers condition. Strategies to develop the beef cattle industry are (1) To provide agricultural markets in order to facilitate farmer's access easily to get some production inputs; (2) To facilitate technology that can be applied by farmers to increase cattle productions, hence improving farmers' welfare; (3) To create a profitable market for animal produced by farmers; and (4) To establish subsystem of financing institutions at the village level to finance farmer's cattle business. The inter-relationship among those strategies is needed to harmonize the implementation, supported by operational government policy.

Key words: Industry, beef cattle, beef self-sufficiency

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia sejak tahun 2005, telah mencanangkan swasembada daging sapi, yaitu impor tidak lebih 10% dari total konsumsi nasional. Sampai saat ini, swasembada daging sapi masih belum tercapai dengan berbagai permasalahan yang dihadapi. Alternatif pilihan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging sapi melalui impor, namun harga impor yang lebih murah dibandingkan dengan harga daging sapi lokal menjadi pesaing berat bagi para peternak sebagai produsen utama daging sapi lokal. Tabel 1 menunjukkan pada periode tahun 2005-2013 terdapat perbedaan antara harga daging sapi impor yang lebih murah dibandingkan dengan daging lokal, meskipun demikian, kemungkinan terdapat daging sapi impor oleh hotel-hotel khusus dengan kualitas prima dan harga yang lebih tinggi.

Lebih dari 90% pasokan daging sapi lokal berasal dari peternakan rakyat dengan skala usaha kecil, sehingga efisiensi produksi rendah atau biaya per unit produksi menjadi tinggi. Apabila besaran impor tidak terkendalikan, akan mengakibatkan harga daging sapi lokal di pasar tertekan dengan harga impor yang murah sehingga peternak merugi. Jika hal tersebut terjadi dalam jangka panjang dan dengan keterbatasan modal, menjadikan peternak tidak bergairah untuk melakukan usaha sapi potong.

Petani-peternak bersifat rasional sesuai dengan hasil penelitian Maart-Noelck & Musshoff (2013) yang menyatakan bahwa perilaku petani dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi guna memperluas usahanya adalah belajar dari investasi sebelumnya dan melakukan pertimbangan nilai yang diperoleh dengan mengamati dari waktu ke waktu. Jika investasi dari waktu ke waktu dapat memberikan nilai tambah atau

menguntungkan, maka petani akan memutuskan berinvestasi sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan produksi dan sebaliknya. Demikian juga bagi peternak sapi potong rakyat di Indonesia, apabila peternak merugi, ditambah adanya keterbatasan modal, maka kenaikan produksi sapi lokal menjadi lamban menyebabkan impor daging sapi rata-rata per tahun bertahan di atas 30%, tetapi dalam dua tahun terakhir terjadi penurunan mendekati 20% (Tabel 2). Tabel 2 menunjukkan bahwa konsumsi daging sapi masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat rata-rata 5,54% per tahun. Meskipun produksi daging sapi lokal juga terus meningkat, namun belum dapat memenuhi kebutuhan konsumsi nasional. Diperkirakan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya pendapatan masyarakat, kebutuhan daging sapi akan terus meningkat dan apabila pola produksi peternakan rakyat tidak berubah secara drastis, maka defisit daging sapi lokal juga akan terus berlanjut, walaupun terjadi penurunan jumlah impor.

Pada akhir tahun 2012, terjadi kebijakan pembatasan impor yang menyebabkan harga daging sapi lokal meningkat tajam, sesuai dengan hukum *supply-demand*. Harga daging sapi yang tinggi, diharapkan peternak akan mendapatkan insentif yang

cukup untuk meningkatkan kesejahteraannya sehingga peternak bergairah untuk meningkatkan produksi sapi potong. Disisi lain, daya beli masyarakat untuk konsumsi daging sapi secara rata-rata rendah (Nur et al. 2012), sehingga konsumen berkeinginan agar pemerintah menurunkan harga daging sapi. Pertanyaannya adalah pertama, apakah dengan membatasi impor dan adanya kenaikan harga daging sapi akan berdampak terhadap peningkatan produksi dan mendorong mewujudkan industri peternakan rakyat yang dapat memproduksi sapi bakalan dalam jumlah banyak dan waktu yang cepat? Kedua, dapatkah menurunkan ketergantungan pada daging impor dan akan tercapai swasembada daging sapi? Jika pasokan daging sapi lokal dan pendapatan peternak meningkat, terutama dari peternakan rakyat sebagai masyarakat golongan ekonomi lemah dimana *marginal propensity to consume* (MPC) tinggi, maka dapat dipastikan akan memberikan *multiplier effect* yang besar terhadap pendapatan nasional dan pada gilirannya dapat meningkatkan daya beli masyarakat (Riani 2011). Di negara-negara sedang berkembang, produksi ternak termasuk ternak sapi potong dapat menjadi solusi alternatif yang penting untuk keluar dari kemiskinan bagi masyarakat di pedesaan (Stür et al. 2013).

Tabel 1. Harga daging sapi lokal vs impor tahun 2005-2013

Harga daging sapi (Rp/kg)	Tahun								
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lokal	40.000	47.500	50.500	54.500	61.500	62.500	65.000	72.700	92.000
Impor	36.411	44.610	46.740	48.472	57.940	55.842	42.000	44.000	54.000

Sumber: APPI (2013)

Tabel 2. Komposisi pemenuhan konsumsi daging sapi nasional 2005-2013

Tahun	Konsumsi nasional	Produk lokal	Impor	Impor terhadap konsumsi nasional (%)
	----- ton -----			
2005	359.100	247.800	111.300	30,99
2006	413.800	294.600	119.200	28,81
2007	396.000	244.200	151.800	38,33
2008	415.200	264.800	150.400	36,22
2009	421.300	278.500	142.800	33,90
2010	417.000	195.800	221.200	53,05
2011 ^{*)}	449.300	292.450	156.850	34,91
2012 ^{**)}	508.900	379.392	129.514	25,45
2013 ^{**)}	549.700	430.002	119.698	21,78
Rata-rata kenaikan per tahun (%)	5,54	9,41	9,21	33,21 ^{***)}

^{***)}: Rata-rata per tahun

Sumber: ^{*)}Suswono (2012); ^{**)}Ditjen PKH (2013)

PROGRAM SWASEMBADA DAGING SAPI DAN PERMASALAHANNYA

Swasembada daging sapi mengamanatkan bahwa 90% kebutuhan konsumsi nasional harus dipasok dari produksi dalam negeri, namun sampai saat ini impor daging sapi masih tinggi. Permasalahan pasokan daging sapi lokal sangat kompleks, hampir seluruhnya berasal dari peternakan rakyat skala kecil 2-3 ekor atau setara 1-3 unit ternak (UT) per peternak dengan sifat usaha yang kurang efisien. Widiati (2006) melaporkan bahwa peternakan sapi potong rakyat yang terintegrasi dengan tanaman di lahan kering lereng Gunung Merapi Yogyakarta dengan pemilikan lahan sekitar 0,5 ha, didukung dengan sumberdaya tenaga kerja keluarga, modal dan kemampuan yang terbatas, hanya akan memperoleh *net farm income* positif dengan pemeliharaan maksimum sekitar 2 UT per peternak. Peningkatan jumlah skala pemeliharaan sapi akan menambah biaya sarana produksi yang harus dibeli dengan harga yang mahal dan lebih tinggi dari nilai produk yang dihasilkan, sehingga berdampak pada *net farm income* negatif atau peternak rugi. Perilaku peternak akan merespon positif untuk meningkatkan skala usaha jika memberikan keuntungan dari aktivitas usahanya dan sebaliknya. Sebagai gambaran pada hari raya Idul Adha, permintaan sapi dari masyarakat kota meningkat tajam. Peternak memahami bahwa pada bulan tersebut ada kenaikan harga jual sapi jantan yang akan menjamin keuntungan, maka peternak menambah jumlah pengusahaan sapi jantan sesuai dengan kemampuan modalnya. Stür et al. (2013) menyatakan bahwa produksi peternakan sapi potong rakyat di Vietnam berhasil diubah menjadi lebih efisien melalui perbaikan kualitas produksi ternak (antara lain pakan yang berkualitas). Hal ini disesuaikan dengan keinginan permintaan dari masyarakat kota, sehingga dapat mengakses pasar produk sapi potong dengan harga yang menguntungkan. Kegiatan tersebut juga disertai dengan peningkatan kapasitas pendampingan dari pemangku kepentingan lokal untuk pengembangan sapi potong secara berkelanjutan. Pada gilirannya, produksi daging akan meningkat secara nasional, disertai peningkatan pendapatan peternak.

Permasalahannya adalah industri sapi potong di Indonesia belum terbentuk sistem agribisnis yang berkesinambungan, sehingga harga sapi mahal terutama pakan serta kesulitan dalam pengadaan modal dan akses pasar *input*. Sistem ini terdiri dari subsistem hulu/pengadaan sarana produksi, *on farm*, hilir/pascapanen dan pemasaran serta subsistem penunjang seperti lembaga perkreditan atau pendanaan yang saling terkait dan mendukung pengembangan peternakan sapi potong rakyat. Sebagai contoh, jika peternak meningkatkan skala usaha berarti harus membeli tambahan sapi antara lain pakan, namun

belum ada pasar yang menyediakan pakan dalam jumlah banyak dengan harga yang terjangkau. Disamping itu, peternak di pedesaan masih kesulitan dalam mengakses modal dengan mudah dan biaya murah (Widiati et al. 2014). Kondisi yang demikian, merupakan permasalahan mendasar untuk mencapai swasembada daging sapi dan jika tidak mendapat penanganan yang tepat akan terjadi stagnasi produksi daging sapi lokal yang berkelanjutan.

Sinyal adanya stagnasi produksi daging sapi dapat dianalisis, antara lain dari hasil sensus (Suswono 2012). Hasil sensus menunjukkan bahwa populasi sapi potong di Indonesia mencapai 14,8 juta ekor dengan sumber pasok daging utama adalah sapi jantan dewasa berjumlah 1,45 juta ekor (Tabel 3). Sumber pasok daging sapi lainnya adalah sapi perah jantan dewasa dengan populasi sebesar 0,02 juta ekor. Berat karkas rata-rata sapi di Indonesia (sapi Bali, Madura, PO dan ACC) adalah 173,56 kg dengan perbandingan daging-tulang 3:1 (Wiyatno 2010). Seandainya sapi jantan dewasa tersebut dipotong semuanya, maka hanya akan menghasilkan daging sapi lokal sebesar 255,133 ribu ton, masih lebih rendah dibandingkan dengan produksi daging sapi lokal dari sumber data yang sama, yaitu sebesar 292,45 ribu ton (Tabel 2).

Tabel 3. Sebaran populasi berdasarkan umur sapi potong di Indonesia 2011

Jenis	Umur	Jumlah (ekor)	Persen (%)
Jantan	Anak	1.446.923	9,77
	Muda	1.816.179	12,27
	Dewasa	1.452.635	9,81
Betina	Anak	1.414.808	9,56
	Muda	2.007.267	13,56
	2-4 tahun	2.687.705	18,15
	5-6 tahun	2.773.985	18,73
	>6 tahun	1.206.298	8,15
Total		14.805.800	100,00

Sumber: Suswono (2012)

Kenyataan di lapang menunjukkan bahwa sapi jantan dewasa yang ada pada peternakan rakyat belum tentu dipotong semuanya, karena pada umumnya peternak kecil akan menjual sapi jika membutuhkan uang tunai. Jika sapi jantan dewasa pada peternakan rakyat diasumsikan hanya dipotong sekitar 60% maka produksi daging sapi lokal untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional akan semakin kecil, yaitu sekitar 153,80 ribu ton (0,6x255,133). Data BPS (2013) menunjukkan bahwa populasi ternak sapi potong, kerbau dan sapi perah menurun, sampai dengan 3 Juni 2013 sekitar 13,27 juta dibandingkan pada tahun 2012 mencapai sekitar 16,49 juta ekor. Informasi ini merupakan sinyal adanya pemotongan sapi selain

jantan dewasa, yaitu betina dan jantan muda yang sulit dihindari.

Pada tahun yang sama, kebutuhan konsumsi nasional 449,30 ribu ton yang berarti kesenjangan pasok daging sapi akan dipenuhi dengan impor dan atau pemotongan sapi lokal. Jika pola produksi sapi potong rakyat tidak berubah, dapat dipastikan impor daging sapi dan atau pemotongan sapi betina dan jantan muda terus meningkat sehingga akan terjadi stagnasi produksi daging sapi lokal yang berkepanjangan.

Pada akhir tahun 2012/2013, harga daging sapi lokal naik karena impor dibatasi dengan harapan adanya insentif kenaikan harga daging maka produsen/peternak bergairah untuk meningkatkan produksinya. Hasil penelitian Widiati et al. (2011) dan Widiati (2012) menunjukkan bahwa secara finansial, usaha sapi potong pembibitan sebagai penghasil sapi bakalan dengan kondisi saat ini belum mampu membayar upah tenaga kerja dan bunga modalnya, sehingga apabila kondisi tidak berubah, baik teknologi yang digunakan, pola usaha maupun kebijakan pemerintah yang tepat maka peternak tidak mampu meningkatkan skala usahanya.

Proses produksi pembesaran sapi potong untuk menghasilkan sapi bakalan sebagai penghasil daging sapi membutuhkan jangka waktu yang relatif panjang. Oleh karena itu, dalam jangka pendek masih perlu adanya impor sapi bakalan untuk digemukkan di dalam negeri sehingga memberikan kesempatan kerja dan nilai tambah produk nasional. Mahendra et al. (2014) menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan pengimpor sapi bakalan masih perlu diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas impor sapi bakalan sehingga tidak terjadi kerugian dari investasi yang telah ditanamkan. Disisi lain, peternakan rakyat didorong agar dapat meningkatkan produksi lebih cepat dalam jumlah banyak sehingga terbentuk industri peternakan rakyat yang dapat memenuhi defisit saat ini dan peningkatan permintaan daging sapi di masa yang akan datang. Upaya tersebut perlu disertai jalan keluar yang lebih dinamis dalam mengurangi pemotongan sapi betina produktif.

ALTERNATIF STRATEGI MEMBANGUN INDUSTRI PETERNAKAN SAPI POTONG RAKYAT

Swasembada daging sapi yang dicanangkan untuk dicapai pada tahun 2014 belum dapat terpenuhi, sementara sebagian besar pasokan daging sapi lokal berasal dari peternakan rakyat, sehingga yang dibutuhkan adalah bagaimana mengubah peternakan rakyat menjadi industri yang berproduksi dalam jumlah banyak dengan waktu yang cepat. Dalam *blue print* PSDSK 2014 edisi revisi telah menyebutkan antara lain, arah kebijakan pemerintah dalam upaya mencapai

swasembada daging sapi yang difokuskan pada strategi pengembangan usaha peternakan rakyat. Hasil penelitian sebelumnya oleh Mayulu et al. (2010) membahas tentang program kebijakan pengembangan peternakan sapi potong di Indonesia. Program-program untuk mendukung kebijakan tersebut telah dicanangkan dan diimplementasikan sejak beberapa tahun, antara lain berupa program sarjana membangun desa (SMD), program pemberian insentif sapi bunting, larangan penyembelihan hewan betina produktif, program pengembangan *village breeding center* (VBC), integrasi tanaman dan ternak, pemberian berbagai macam skim kredit murah dan pengembangan aspek teknis (Priyanto 2011; Suswono 2012). Hasil dari program-program tersebut antara lain bahwa produksi daging sapi lokal sampai tahun 2013 meningkat, meskipun impor masih tinggi.

Widiati & Kusumastuti (2013) menyatakan bahwa terbentuknya suatu industri pertanian/peternakan yang dapat berproduksi secara lebih cepat dan dalam jumlah banyak dimulai dari terbangunnya sistem agribisnis yang berkesinambungan. Hasil penelitian Ekowati et al. (2011) menunjukkan bahwa penerapan konsep agribisnis dan peningkatan peran lembaga pendukung agribisnis berpengaruh positif terhadap produksi sapi potong.

Direktorat Pangan dan Pertanian (2011) telah mengkaji tentang strategi dan kebijakan pencapaian swasembada daging sapi yang diperlukan meliputi (1) Kebijakan impor dan pasar yang mendukung; (2) Pengembangan zona produksi hijauan pakan dan strukturisasi tata niaga bahan baku pakan dan subsidi harga bahan baku pakan; dan (3) Ekstensifikasi kelembagaan mikro bagi peternak. Dimana ketiga poin tersebut juga bagian dari konsep agribisnis. Rouf et al. (2014) mengkaji upaya meningkatkan daya saing usaha sapi potong rakyat sehingga produksi dalam negeri lebih menguntungkan daripada impor, diperlukan koordinasi dan sinergi kebijakan antara pemangku kepentingan dan pelaku ekonomi yang lebih baik melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan subsektor peternakan yang harus dipandang sebagai sebuah sistem yang meliputi subsistem dari hulu sampai hilir.

Berdasarkan uraian di atas, maka alternatif strategi dan implementasinya untuk membangun peternakan sapi potong rakyat menjadi industri menuju pada pencapaian swasembada daging sapi antara lain, ketersediaan sarana produksi, teknologi yang dibutuhkan peternak, pasar produk sapi potong dan kelembagaan pendukungnya.

Ketersediaan sarana produksi

Sampai saat ini, di pedesaan yang merupakan wilayah produksi sapi potong, baik di Jawa maupun

luar Jawa belum terbentuk pasar *input* atau sarana produksi secara khusus dan terbuka luas. Utamanya adalah pasar (pakan hijauan dan konsentrat) berbasis sumberdaya lokal, seperti rumput, jerami padi, jagung, bekatul, bungkil kelapa, ampas tahu dan lainnya. Kondisi yang demikian, menyebabkan jika peternak meningkatkan skala usahanya akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan sarana produksi dalam jumlah yang cukup, sehingga peternak harus membeli dengan biaya yang mahal.

Alternatif upaya untuk memecahkan masalah tersebut antara lain adalah dukungan pemerintah untuk membangun fasilitas umum, antara lain pasar pertanian yang menyediakan saprodi ternak. Tersedianya saprodi seperti pakan hijauan, suplemen, obat-obatan dan saprodi lainnya di pasar pertanian akan memudahkan peternak mengakses dengan harga yang kompetitif dan menguntungkan. Disisi lain, mendorong para investor untuk mengembangkan industri pemasok pakan dan sarana produksi lainnya yang sudah diproses dengan sentuhan teknologi untuk didistribusikan melalui pasar-pasar pertanian. Teknologi untuk meningkatkan kandungan nutrisi bahan pakan sudah banyak tersedia, sebagai contoh saos *burger* pakan (SBP) (Agus 2013) dan hasil-hasil penelitian lain tentang peningkatan nilai nutrisi pakan (Prawiradiputra 2011; Prawirodigo & Utomo 2011; Ginting 2012; Herawati 2013).

Pakan merupakan biaya terbesar (60-70%) dari biaya operasional, sehingga perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, hasil-hasil penelitian perlu disaring secara teknis dan ekonomis, disosialisasikan dan diimplementasikan kepada pengguna secara luas. Sebagai gambaran, jerami padi merupakan bahan pakan potensial untuk sapi potong. Herawati (2013) menyatakan bahwa jerami padi yang dimanfaatkan sebagai pakan ternak baru sekitar 31-39%, sedangkan 36-62% dibakar dan 7-16% dimanfaatkan untuk industri. Lebih lanjut dikatakan bahwa produksi jerami padi per hektar pada penanaman dua kali per tahun dapat menyediakan pakan untuk 2-3 ekor sapi dewasa per tahun setara 2-3 UT. Menurut BPS (2013) luas panen padi sawah dan ladang di Indonesia tahun 2013 adalah 13,835 ribu hektar. Jika diasumsikan rata-rata tanam padi satu kali dan jerami padi dimanfaatkan secara efektif 40% untuk pakan sapi potong, maka dari jerami tersebut dapat menyediakan pakan untuk 5-6 juta ekor sapi dewasa per tahun. Masih banyak hasil sampingan produk tanaman pertanian yang berkualitas sebagai bahan pakan sapi potong, seperti bekatul, jagung, tebu dan kacang-kacangan, serta pastura dan bungkil kelapa sawit yang banyak dihasilkan Indonesia (Rouf et al. 2014).

Alternatif ini merupakan suatu tantangan, namun juga sebagai peluang untuk menciptakan kesempatan kerja baru dari subsektor peternakan yang cukup menjanjikan. Dengan masuknya era masyarakat

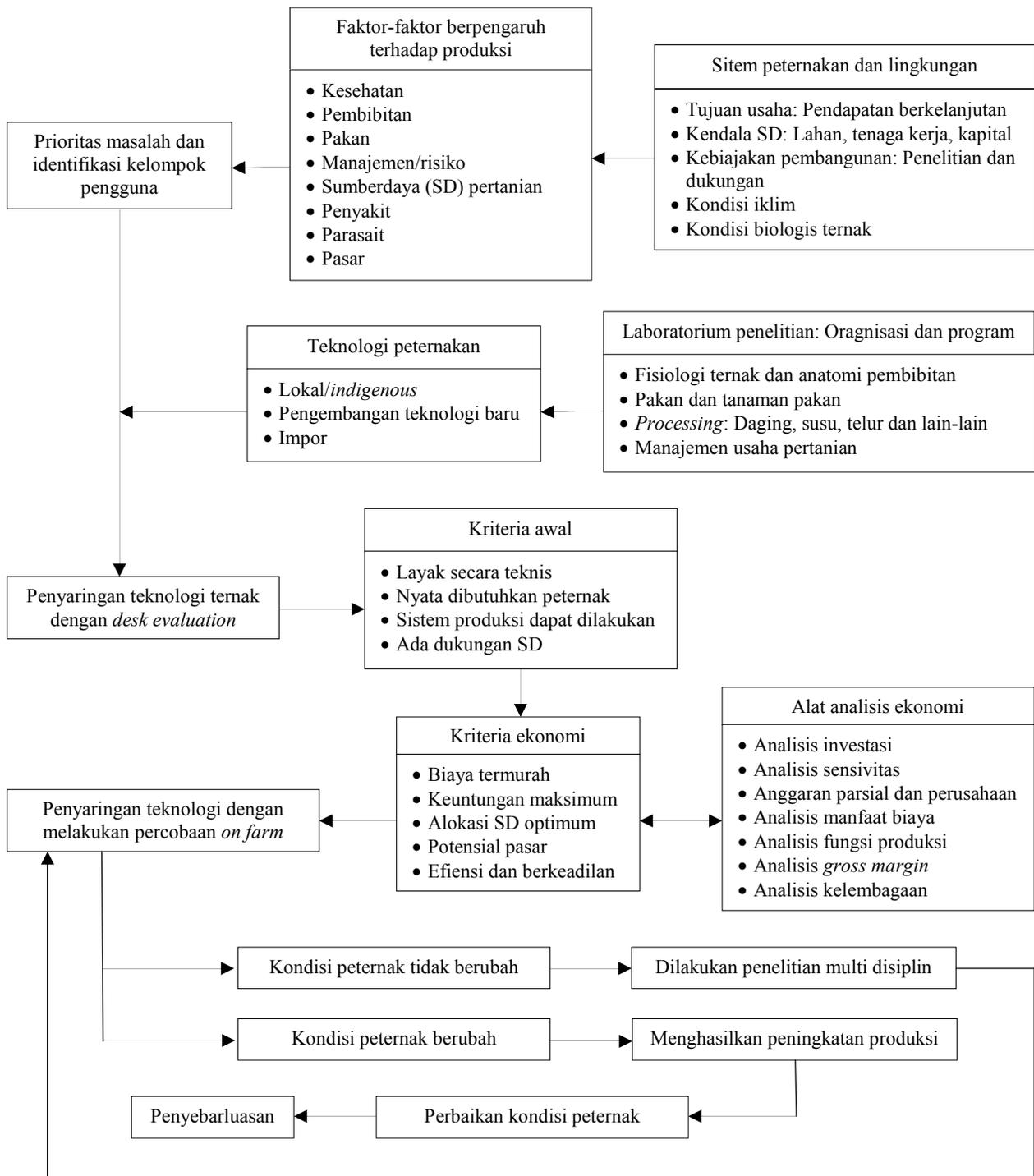
ekonomi Asia maka konsep ini dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan protein hewani asal ternak.

Ketersediaan teknologi bagi peternak

Penggunaan teknologi dapat meningkatkan produksi dan produktivitas, namun membutuhkan tambahan biaya. Oleh karena itu, dalam mengembangkan teknologi perlu disaring atau diuji secara teknis dan ekonomi sebelum disebarluaskan kepada peternak. Kompleksitas dan biaya tinggi dalam mengembangkan teknologi, sudah umum terjadi pada peternakan di negara sedang berkembang yang menjadikan stagnasi dalam proses produksi. Hasil penelitian Roessali et al. (2011) menunjukkan bahwa respon penggunaan teknologi sapi potong pada peternakan rakyat di Jawa Tengah dipengaruhi secara signifikan oleh pendapatan non-sapi, sedangkan pendapatan dari usaha sapi potong justru tidak berpengaruh secara signifikan. Ini berarti, para peternak tersebut membutuhkan teknologi dengan penyaringan berdasar ekonomi yang membutuhkan biaya murah dan memberi keuntungan maksimum, alokasi sumberdaya (SD) optimum dan potensial pasar (Gambar 1). Sebagai contoh, adanya perbaikan teknologi reproduksi pada usaha pembibitan sapi potong sampai pada *calving interval* 13 bulan, diestimasi akan layak diusahakan jika tingkat bunga modal di bawah 3,5% (Widiati 2014), selanjutnya pernyataan tersebut perlu diuji dengan percobaan di tingkat peternak.

Dari Gambar 1 dapat dijelaskan bahwa sebelum penyaringan secara ekonomi, teknologi yang dipilih harus nyata dibutuhkan, layak secara teknis dan dapat dilakukan oleh peternak/pengguna, serta ada dukungan sumberdaya. Hal ini didukung oleh Verschelde et al. (2013) yang menyatakan bahwa pada kegiatan *on farm*, sumberdaya yang dimiliki petani peternak di negara sedang berkembang adalah kecil dan lingkungan pertaniannya terbatas serta bervariasi, seperti luas lahan dan kesuburan serta jenis tanaman dan bangsa ternaknya.

Peran lembaga penelitian dan pengembangan, termasuk perguruan tinggi sangat dibutuhkan dalam menghasilkan teknologi. Dalam melaksanakan penelitian perlu bekerjasama dengan para penyuluh, karena pada tingkat *on farm*, penyuluh berperan dalam transfer teknologi, monitoring dan evaluasi sampai pada teknologi tersebut dapat meningkatkan produksi, produktivitas, sekaligus dapat mensejahterakan peternak dan tersebar luas di masyarakat. Jika introduksi teknologi belum dapat meningkatkan kesejahteraan peternak, maka perlu perbaikan dengan melakukan penelitian multi disiplin sesuai dengan masalah yang dihadapi.



Gambar 1. Penyaringan teknologi untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatan peternak rakyat

Sumber: Amir & Knipscheer (1989) yang dimodifikasi

Ketersediaan pasar produk dan sistem transportasi

Usaha sapi potong di Indonesia mempunyai potensi pasar yang besar, baik untuk memenuhi

kebutuhan nasional maupun ekspor ke Timur Tengah, karena Indonesia dapat menghasilkan produk halal. Usaha pembibitan, pembesaran dan penggemukan sapi potong lokal merupakan serangkaian usaha untuk

menghasilkan dan meningkatkan populasi dan produktivitas di suatu daerah yang hampir semuanya dilakukan oleh peternakan rakyat. Pasar hewan sebagai sarana penjualan ternak hidup sudah tersedia di setiap kecamatan/desa, namun demikian belum sepenuhnya memberikan fasilitas yang memadai kepada peternak dalam menjual hasil produknya.

Pasar hewan lebih bermanfaat bagi pedagang ternak maupun blantik, sebagai tempat pengumpulan dan transit ternak dalam perdagangan, maupun sebagai pusat informasi (Arinto 2004; Sukanata et al. 2013). Dikatakan lebih lanjut bahwa peternak sapi potong tidak dapat meraih hasil yang maksimal dan tidak diuntungkan karena harga sapi ditetapkan oleh pedagang atau blantik dan belum berdasarkan berat badan tertimbang (Sukanata et al. 2013).

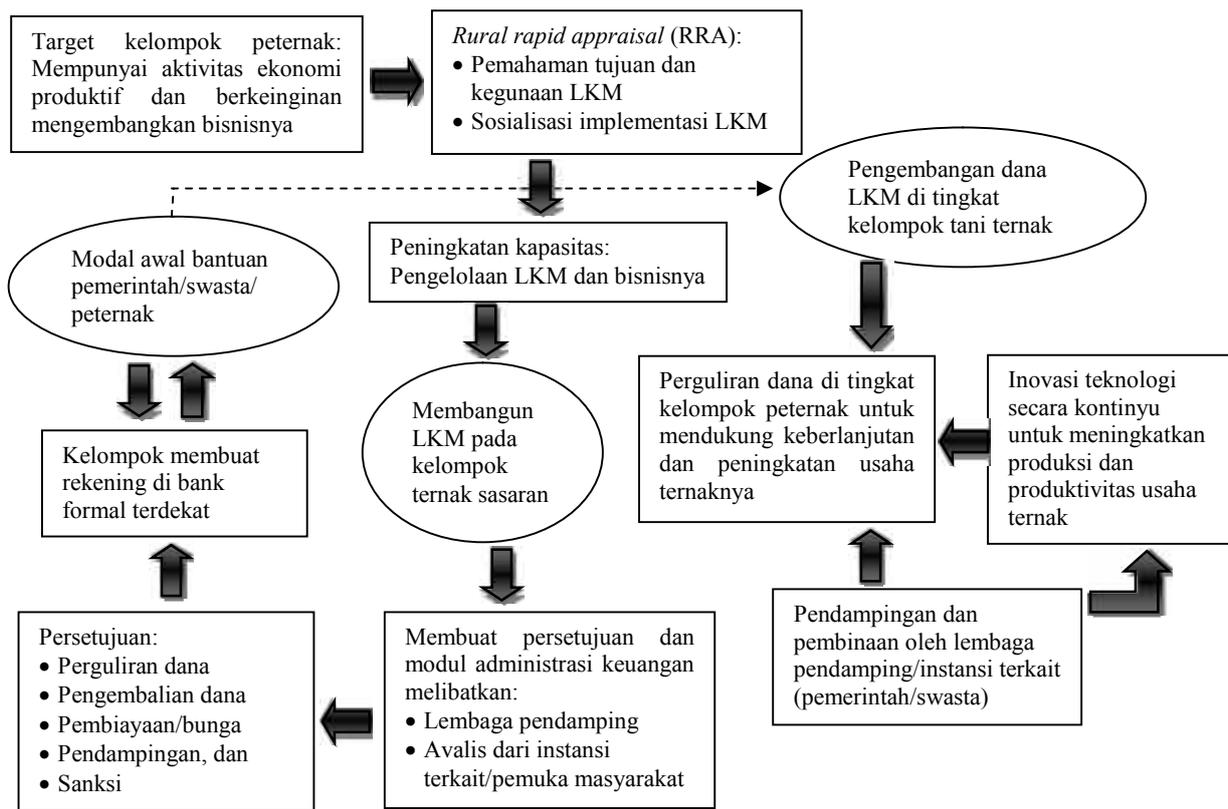
Masalah *urgent* lainnya adalah fasilitas transportasi sapi antar pulau masih dirasa sangat mahal (Purba & Hadi 2012) dan adanya impor daging sapi dengan harga yang lebih murah akan berdampak pada turunnya harga daging sapi lokal yang berisiko merugikan peternak (Widiati & Kusumastuti 2014). Kebijakan pemerintah dalam subsistem pemasaran ternak dapat berupa pengendalian/pembatasan impor secara tepat, penggunaan sarana transportasi dalam pemasaran secara efisien, reorganisasi fungsi pasar hewan yang dapat menguntungkan peternak sehingga menggairahkan peternak untuk meningkatkan produksinya. Sebagai gambaran pada akhir tahun 2012, pemerintah membatasi impor, maka harga daging sapi lokal naik dan menguntungkan peternak. Namun, di sisi lain penggunaan teknologi dan pemasaran yang belum efisien, serta budaya peternak rakyat yang kurang berorientasi komersial karena telah apatis dengan kondisi sebelumnya, maka peluang keuntungan dalam jangka pendek kemungkinan belum dapat sepenuhnya dicapai. Walaupun demikian, adanya pembatasan impor yang disertai dengan perbaikan kebijakan-kebijakan pendukung dalam pengadaan sarana produksi termasuk pengadaan modal, teknologi dan pemasaran ternak sapi akan mempercepat terbentuknya industri peternakan rakyat dalam waktu yang tidak terlalu panjang yang berdampak pada pencapaian swasembada daging sapi. Rouf et al. (2014) menyatakan bahwa dari perhitungan *domestic resources cost*, usaha sapi potong di Indonesia memiliki daya saing dari penggunaan tenaga kerja, sumberdaya pertanian, permintaan pasar dan inovasi teknologi tepat guna.

Kelembagaan yang mendukung pengembangan usaha sapi potong

Kelembagaan sebagai subsistem penunjang diperlukan untuk mengembangkan agribisnis pertanian/peternakan (Penson et al. 2005). Hasil penelitian Rizov et al. (2013) menunjukkan bahwa

subsidi berdampak negatif pada produktivitas petani di *European Union* (EU) sebelum periode pembaharuan kelembagaan diimplementasikan, selanjutnya setelah pembaharuan diimplementasikan maka subsidi dapat meningkatkan produktivitas. Di Indonesia, pembaharuan kelembagaan di tingkat peternak berupa penguatan kelompok peternak yang telah banyak terbentuk di masyarakat diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan berupa inovasi teknologi dan penerimaan subsidi. Subsidi untuk peternakan sapi potong rakyat, antara lain berupa bantuan langsung material maupun pendanaan kepada kelompok peternak. Kelembagaan kelompok peternak yang kuat dan kebijakan-kebijakan yang mendukung diharapkan akan cepat dapat direspon oleh peternak berupa implementasi sesuai dengan permintaan pasar dan menguntungkan. Sebagai contoh pembaharuan dapat berupa terbangunnya lembaga perkreditan di tingkat kelompok, pendidikan SDM, penelitian dan pengembangan (Widiati & Kusumastuti 2013). Tugas pokok dan fungsi setiap lembaga perlu ditetapkan secara jelas dan dipahami serta diimplementasi dan hasilnya dievaluasi secara kontinyu. Adanya perbaikan kelembagaan, akan memudahkan para pemangku kepentingan dan peternak dalam melaksanakan program-program yang telah dicanangkan. Meskipun demikian, terkait pengaruh kelembagaan terhadap efisiensi produksi dan produktivitas pada peternakan sapi potong rakyat di Indonesia masih perlu dukungan penelitian secara berkelanjutan untuk menjawab tantangan baru yang muncul.

Mengubah peternakan sapi potong subsisten menjadi komersial dengan skala lebih besar, perlu didukung program fasilitasi kelembagaan pembiayaan atau perkreditan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peternak. Pemerintah telah mengantisipasi masalah permodalan pada usaha mikro, termasuk usaha peternakan dengan dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 2013 tentang Program Fasilitasi Pembiayaan melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Dalam UU tersebut, pada pasal 1 yang dimaksud LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Lembaga keuangan mikro sangat diperlukan sebagai basis penguatan dalam pemberdayaan kelompok sapi potong rakyat yang mempunyai kegiatan ekonomi dapat menghimpun dana secara mandiri dan tidak terjadi ekspor dana (membayar bunga) ke luar kelompok. Gambar 2 menunjukkan bahwa model pembentukan LKM dimulai dari penentuan target kelompok peternak sasaran yang harus memenuhi syarat mempunyai



Gambar 2. Model pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) untuk mendukung peningkatan produksi dan keberlanjutan usahatani peternakan yang tergabung dalam kelompok

Sumber: Widiati et al. (2014)

aktivitas ekonomi produktif (berupa usaha sapi potong) dan mempunyai keinginan (dapat dimotivasi) untuk mengembangkan usaha ternaknya.

Rapid rural appraisal (RRA) dilakukan terhadap kelompok sasaran, tentang pemahaman tujuan dan kegunaan serta implementasi LKM. Dana awal LKM dapat berasal dari bantuan langsung pemerintah atau swasta dengan tingkat bunga rendah dan atau dapat dihimpun dari peternak sendiri. Berkelompok bagi masyarakat pedesaan merupakan tradisi/budaya gotong royong yang memunculkan kearifan lokal sehingga perguliran dana di tingkat kelompok dapat berjalan dengan lancar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aktivitas perguliran dana pada kelompok peternak disertai pembinaan dan inovasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas usaha maka kelompok peternak sasaran mampu membayar bunga/jasa pembinaan 0,3% per bulan ditambah 1,2% per bulan untuk pemupukan modal kelompok. Perguliran dana pada kelompok dimanfaatkan 50% untuk mendukung usaha ternak, sebesar 18,20% untuk aktivitas produktif lainnya dan 31,20% untuk mendukung pengeluaran konsumsi

rumah tangga. Pada gilirannya, perilaku peternak yang umumnya sewaktu-waktu menjual ternaknya guna memenuhi kebutuhan keluarga yang mendesak dapat dihindarkan dan usaha ternak dapat berkembang secara berkelanjutan (Widiati et al. 2014).

Model LKM tersebut dapat ditindaklanjuti untuk dibuat pada kelompok-kelompok ternak dalam satu wilayah perdesaan dan selanjutnya dilembagakan menjadi usaha milik desa/kalurahan sesuai dengan UU yang telah dicanangkan pemerintah. Adanya pembaharuan kelembagaan diharapkan dapat mendukung pengembangan peternakan sapi potong rakyat menjadi lebih maju dan mendorong terbentuknya industri peternakan sapi potong rakyat.

KESIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan di atas dapat ditarik butir-butir yang penting untuk membangun industri peternakan sapi potong rakyat dalam upaya mewujudkan swasembada daging sapi ke depan, sebagai berikut, diperlukan pasar pertanian yang memudahkan akses peternak kecil untuk mendapatkan

sarana produksi terutama pakan dan bibit ternak unggul dalam meningkatkan skala usahanya. Pemanfaatan teknologi yang operasional memberikan keuntungan melalui peningkatan produktivitas ternaknya. Dalam hal ini, perlu adanya kerjasama yang bersinergi antara instansi Litbang Pertanian, perguruan tinggi dan para penyuluh lapangan serta kelompok peternak.

Diperlukan dukungan kebijakan pemerintah dalam subsistem pemasaran ternak berupa pengendalian/pembatasan impor secara tepat, mengefisienkan sarana transportasi dalam pemasaran, reorganisasi fungsi pasar hewan yang menguatkan posisi tawar bagi peternak. Pemberdayaan dan penguatan kelompok-kelompok peternak sapi potong disertai dengan pengembangan lembaga pembiayaan dalam bentuk LKM dan pendampingan serta pembinaan dari instansi terkait.

Strategi dan kebijakan pemerintah diperlukan pada setiap subsistem dalam sistem agribisnis sapi potong disertai dengan kelembagaan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mensinergikan subsistem dari hulu sampai hilir. Berkelompok bagi para peternak akan dapat memunculkan kearifan lokal, sehingga usaha peternakan rakyat dapat dikembangkan menjadi industri melalui kelembagaan kelompok yang di sinergikan dengan lembaga pemerintah dan swasta terkait.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Ir. Endang Baliarti, SU, Guru Besar bidang Produksi Ternak dan Prof. Dr. Ir. Ristianito Utomo, SU, Guru Besar pada bidang Nutrisi Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan masukan dan saran perbaikan dalam penulisan makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus A. 2013. Pakan ternak secara mandiri. Yogyakarta (Indonesia): PT Citra Adi Pratama.
- Amir P, Knipscheer HC. 1989. Conducting on-farm animal research. Procedure & economi analysis. Singapore (Singapore): Singapore National Printed Ltd.
- APPHI. 2013. Harga daging sapi impor lebih murah. Dalam: Kompas [Internet]. [disitasi 18 Agustus 2014]. Jakarta (Indonesia): Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia. Tersedia dari: www.kompas.com
- Arinto. 2004. Usaha dan efisiensi pemasaran sapi potong di wilayah pembibitan dan pembesaran (studi kasus di wilayah Grobogan, Jawa Tengah) [Disertasi]. [Yogyakarta (Indonesia)]: Universitas Gadjah Mada.
- BPS. 2013. Hasil sensus pertanian 2013. Jakarta (Indonesia): Badan Pusat Statistik.

- Direktorat Pangan dan Pertanian. 2011. Strategi dan kebijakan dalam percepatan pencapaian swasembada daging sapi 2014 (suatu penelaahan konkrit). Info Kaji Bappenas. 8:70-77.
- Ditjen PKH. 2013. Statistik peternakan dan kesehatan hewan 2013. Jakarta (Indonesia): Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Ekowati T, Darwanto DH, Nurtini S, Suryantini A. 2011. The analysis of beef cattle subsystem agribusiness implementation in Central Java Province, Indonesia. JITAA. 36:281-289.
- Ginting SP. 2012. Prospek penerapan teknologi proses pakan berbasis hasil samping industri perkebunan pada ruminansia kecil. Wartazoa. 22:53-64.
- Herawati R. 2013. Suplementasi *Saccharomyces cerevisiae* dan daun lamtoro dalam ransum berbasis jerami padi amoniasi untuk meningkatkan produktivitas ternak sapi [Disertasi]. [Padang (Indonesia)]: Universitas Andalas.
- Maart-Noelck SC, Musshoff O. 2013. Investing today or tomorrow? An experimental approach to farmers' decision behaviour. JAE. 64:295-318.
- Mahendra AVH, Arifin Z, Abdillah Y. 2014. Analisis dampak kebijakan pembatasan kuota impor sapi terhadap kinerja perusahaan (studi kasus pada PT Great Giant Livestock (GGLC), Lampung Tengah-Lampung). J Admnistrasi Bisnis. 13:1-8.
- Mayulu H, Sunarso, Sutrisno CI, Sumarsono. 2010. Kebijakan pengembangan peternakan sapi potong di Indonesia. J Litbang Pertanian. 29:34-41.
- Nur YH, Nuryati Y, Resnia R, Santoso AS. 2012. The analysis of factors and projection of national food consumption: The cases of rice, soybean and beef. Bul Ilmu Litbang Perdagangan. 6:37-52.
- Penson JB, Capps O, Rosson CP. 2005. Introduction to agricultural economic. 3rd ed. Upper Saddle River (US): Prentice Hall.
- Prawiradiputra BR. 2011. Tanaman pakan untuk menunjang rehabilitasi peternakan di lereng Gunung Merapi. Wartazoa. 21:171-178.
- Prawirodigdo S, Utomo B. 2011. Inovasi teknologi dekomposisi limbah organik dalam penyediaan pakan. Wartazoa. 21:60-71.
- Priyanto D. 2011. Strategi pengembangan usaha ternak sapi potong dalam mendukung program swasembada daging sapi dan kerbau tahun 2014. J Litbang Pertanian. 30:108-116.
- Purba HJ, Hadi PU. 2012. Dinamika dan kebijakan pemasaran produk ternak sapi potong di Indonesia Timur. Anal Kebijakan Pertanian. 10:361-373.
- Riani NZ. 2011. Kecenderungan konsumsi marginal di kalangan masyarakat Indonesia. J Tingkap. 7:189-199.

- Rizov M, Pokrivcak J, Ciaian P. 2013. Common agricultural policy (CAP) subsidies and productivity of the EU farms. *JAE*. 64:537-557.
- Roessali W, Masyhuri, Nurtini S, Darwanto DH. 2011. Factors influencing farmers' decision to increase beef cattle business scale in Central Java Province. *J Indonesia Trop Anim Agric*. 36:27-35.
- Rouf AA, Daryanto A, Fariyanti A. 2014. Daya saing usaha sapi potong di Indonesia: Pendekatan *domestic resources cost*. *Wartazoa*. 24:97-107.
- Stür W, Khanh TT, Duncan A. 2013. Transformation of smallholder beef cattle production in Vietnam. *Int J Agric Sust*. 11:363-381.
- Sukanata IW, Suparta N, Parimartha KW, Budiarta IW, Suciani. 2013. Strategi peningkatan efisiensi pemasaran sapi potong pada kelompok peternak sapi Mekar Jaya di Desa Puhu-Payangan. *Udayana Mengabdi*. 12:5-9.
- Suswono. 2012. *Blue print* program swasembada daging sapi dan kerbau (PSDSK) 2014. Edisi revisi. Jakarta (Indonesia): Kementerian Pertanian.
- Verschelde M, D'Haese M, Rayp G, Vandamme E. 2013. Challenging small-scale farming: A non-parametric analysis of the (inverse) relationship between farm productivity and farm size in Burundi. *JAE*. 64:319-342.
- Widiati R, Kusumastuti TA. 2013. Manajemen agribisnis: Aplikasi pada industri peternakan. Edisi ke-1. Yogyakarta (Indonesia): CGS Press-PT Citra Gama Sakti.
- Widiati R, Kusumastuti TA. 2014. Perkembangan harga daging sapi dan pengaruhnya terhadap produksi sapi potong di Provinsi Jawa Timur. Dalam: Socbeb M, Alimon AR, Adiarto, Susanto A, Sodik A, Wabdi A, Indrasanti D, Hafid H, Budisatria IGS, Sumarmono J, et al., penyunting. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi dan Agribisnis Peternakan untuk Akselerasi Pemenuhan Pangan Hewani (Seri II)*. Purwokerto, 14 Juni 2014. Purwokerto (Indonesia): Universitas Jenderal Soedirman. p. 350-357.
- Widiati R, Nurtini S, Paramitasari S, Kusumastuti TA. 2011. Parameter produksi dan profitabilitas usahatani pembibitan sapi potong di pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam: *Proceeding of National Seminar on Zootechniques for Indigenous Resources Development*. Faculty of Agriculture, Diponegoro University. Semarang, 19-20 Oktober 2011. Semarang (Indonesia): Diponegoro University. p. 301-304.
- Widiati R, Suranindyah YY, Haryadi T. 2014. Development of micro finance institutions model in the rural farmer groups to support sustainable agribusiness of dairy goats: A pilot study. In: Wiryanan KG, Liang JB, Takahashi J, Orskov ER, Devendra C, Toharmat T, Sutama K, Kustantinah, Purnomoadi A, Manalu W, et al., editors. *The role of dairy goat industry on food security, sustainable agricultural production and economic communities*. *Proceeding The 2nd Asian-Australasian Dairy Goat Conference*. Bogor, 25-27 April. 2014. Bogor (Indonesia): Bogor Agricultural University. p. 352-354.
- Widiati R. 2006. The integration of beef cattle farming system on the farm household in Merapi Volcanic Slope, Sleman Yogyakarta (The application of linear programming analysis model toward sustainable livestock development). In: *Proceeding 4th Int Semin Trop Anim Prod Fac Anim Sci Gadjah Mada Univ*. Yogyakarta (Indonesia): Gadjah Mada University. p. 536-541.
- Widiati R. 2012. Financial feasibility of beef cattle breeding with various capital aids in rural area of Gunung Kidul District of Yogyakarta. *Bul Anim Sci*. 36:1-7.
- Widiati R. 2014. Estimasi finansial usaha sapi potong pembibitan skala rumah tangga yang diinovasi dengan pengembangan teknologi reproduksi. Dalam: *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Peternakan Indonesia Berbasis Riset Inovatif Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret*. Surakarta, 22-23 Oktober 2014. Surakarta (Indonesia): Universitas Sebelas Maret.
- Wiyatno MF. 2010. Perbandingan indek perdagangan sapi-sapi Indonesia (sapi Bali, Madura, PO, dengan sapi ACC [Tesis]. [Bandung (Indonesia)]: Universitas Padjadjaran.